

# **JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN**

Kajian Teori dan Penelitian  
Masalah Manajemen Pendidikan

Februari 2015, Volume 7, No. 1

ISSN 1412-985X

**JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN**  
(Kajian Teori dan Penelitian Masalah Manajemen Pendidikan)

---

Jurnal Manajemen Pendidikan terbit tiga kali setahun, yaitu bulan Februari, Juni dan Oktober. Isi jurnal berupa hasil penelitian, aplikasi teori, analisis dan kajian pustaka tentang Manajemen Pendidikan

**Ketua Penyunting**  
Abdul Kadim Masaong

**Penyunting Pelaksana**  
Arifin Sukung  
Asrin  
Arwildayanto  
Isnanto  
Sitti Roskina Mas  
Arfan Arsyad

**Penyunting Ahli**  
Ansar  
Ihfan Haris

**Pelaksana Tata Usaha**  
Warni T. Sumar  
Novawati Kansil

---

**Alamat Editor dan Redaksi:**  
Jurusan Manajemen Pendidikan  
Jl. Jend. Sudirman No. 06 Kota Gorontalo  
Telp./Faks (0435) 826773  
Email: [mapend\\_ung@yahoo.co.id](mailto:mapend_ung@yahoo.co.id)

---

## DAFTAR ISI

Hubungan Kecerdasan Intelektual, Kecerdasan Emosional, Kecerdasan Spiritual Guru dengan Penerapan Kompetensi Pedagogik Guru Mata Pelajaran pada Sekolah Menengah di Kecamatan Toili Kabupaten Banggai <i>Ansar Rappe, Abd. Kadim Masaong</i>	1 – 11
Pengaruh Kecerdasan Emosional, Kecerdasan Spiritual dan <i>Burnout</i> Terhadap Kinerja Tenaga Penunjang Akademik di Universitas Negeri Gorontalo <i>Risnawaty Suleman, Fadliah</i>	12 – 19
Pengaruh Perilaku Kepemimpinan Transformasional, Keterampilan Manajerial Kepala Sekolah dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Guru di Wilayah Boliyohuto <i>Risna Bawode</i>	20 – 28
Hubungan Efektifitas Komunikasi Sekolah dan Kompensasi Dengan Kerja Guru SMA di Wilayah Boliyohuto <i>Sumri Harun, Ihfan Haris</i>	29 – 38
Pengaruh Kecerdasan Emosional, Spiritual, dan Kompetensi Sosial Terhadap Iklim Sekolah Se-Wilayah Boliyohuto <i>Lusiani Luluk</i>	39 – 49
Pengaruh Kebijakan Pendidikan Gratis dan Tingkat Pendapatan Orang Tua Terhadap Partisipasi dalam Pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri Model Gorontalo dan Madrasah Aliyah Luqman Alhakim Kabupaten Gorontalo <i>Yulinda Wahyuni Anis, Syamsu Qamar Badu</i>	50 – 58
Pengawasan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah pada Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah Luwuk <i>Anik Mufarrihah, Arifin Sukung</i>	59 – 67
Hubungan Antara Pelaksanaan Supervisi Kepala Sekolah dan Motivasi Kerja dengan Kepuasan Kerja Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Se-Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo <i>Abdul Wahid Mohidin</i>	68 – 78
Evaluasi Kinerja Pengawas Madrasah di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banggai <i>Muhammad Basri</i>	79 – 88
Efektivitas Program Supervisi Akademik Kepala Sekolah Dasar di Kota Gorontalo <i>Maryam Suleman, Nina Lamatenggo</i>	89 – 97
Hubungan Iklim Belajar dan Pemberian Penghargaan dengan Motivasi Belajar Siswa Pada SMP Negeri 4 Luwuk Kabupaten Banggai <i>Moh. Anwar Djabir Toindeng</i>	98 – 106
Pembinaan Kompetensi Kewirausahaan Siswa SMK Negeri 1 Limboto Kabupaten Gorontalo <i>Nurhasana Raden Ali Dhanupoyo, Sitti Roskina Mas</i>	107 – 120

---

**PENGAWASAN MAJELIS PENDIDIKAN  
DASAR DAN MENENGAH PADA SEKOLAH  
MENENGAH PERTAMA MUHAMMADIYAH LUWUK**

**Anik Mufarrihah<sup>1</sup>, Arifin Siking<sup>2</sup>**  
[arifin\\_siking@ung.ac.id](mailto:arifin_siking@ung.ac.id)

**ABSTRACT**

Purpose of this research are: 1) supervision on curriculum management; 2) supervision on human resource; 3) supervision on availability of school facilities; and 4) supervision on school financial management. This research uses descriptive-explanatory method. Data analysis is done qualitatively and quantitatively. The analysis technique quantitatively and qualitatively. Technique of collection is quantitative and qualitative research type of field research. The research obtained from research subjects that can be obtained through an interview verbally or in written form through the analysis of documents. The data source of this research is the informant who was in school, the school principal deputy principal, treasurer of the school, Primary and Secondary Education Council, School Committee, the Regional Leadership of Muhammadiyah, the data collection procedures of this study is to use the method of information, the interview method and the method of documentation, while the analytical techniques descriptive qualitative method of data consisting of three activities, namely the collection of data while data reduction, data presentation and conclusion. Observing the results of this study can be expressed as follows: 1) .Supervision in the implementation of the curriculum at the School of Management of Muhammadiyah Luwuk not achieve maximum results that are expected participation Dikdasmen Council to determine the design of which is the center of educational activities. 2). Intention Assembly Dikdasmen expect better in the future with regard to the Implementation Monitoring workforce who do the hiring, placement, pebinaan and dismissal of education personnel in accordance Qaeda Dikdasmen Assembly, as well as for the development of more advanced schools for the implementation of the ideals of Muhammadiyah. 3) . Supervision in Implementation Management and Infrastructure is also a means of roles and responsibilities of the Assembly Dikdasmen, facilities and infrastructure that exist in the School of Muhammadiyah Luwuk adequate management just is not done well. 4) .Future assemblies Dikdasmen on Oversight Role in the implementation of Financial Management should be increased again for the sake of progress Luwuk Muhammadiyah junior high school.

**Keywords :** *Supervision, Board of Elementary, Muhammadiyah*

**A. PENDAHULUAN**

Pengawasan pendidikan diartikan sebagai proses kegiatan monitoring dan evaluasi untuk meyakinkan bahwa semua kegiatan pendidikan di satuan pendidikan terlaksana seperti yang direncanakan dan sekaligus juga merupakan kegiatan untuk mengoreksi dan memperbaiki bila ditemukan adanya penyimpangan yang akan mengganggu pencapaian tujuan (Robbins, 1997). Pengawasan juga merupakan fungsi manajemen yang diperlukan

<sup>1</sup> Universitas Muhammadiyah Luwuk

<sup>2</sup> Universitas Negeri Gorontalo

untuk mengevaluasi kinerja satuan pendidikan atau unit-unit dalam suatu organisasi sekolah guna menetapkan kemajuan sekolah sesuai dengan arah yang dikehendaki (Wagner dan Hollenbeck dalam Mantja, 2001). Oleh karena itu pengawasan pendidikan adalah fungsi manajemen pendidikan yang harus diaktualisasikan, seperti halnya fungsi manajemen lainnya (Mantja, 2001).

Pendidikan Muhammadiyah yang dirintis oleh KH. Ahmad Dahlan tergolong pada kategori lembaga pendidikan umum yang bernafaskan Islam (Buchori, 1994: 50). Selain sebagai media transformasi ilmu, pendidikan di sekolah Muhammadiyah juga dijadikan sebagai usaha kaderisasi dalam persyarikatan Muhammadiyah itu sendiri. Seperti halnya pendidikan umum lainnya, di perguruan Muhammadiyah juga diajarkan Pendidikan Agama Islam (PAI) mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi, namun yang membedakan PAI di lembaga pendidikan Muhammadiyah merupakan nomenklatur (ciri khusus) Al-Islam Kemuhammadiyah (ISMU) sebagai ciri khusus di sekolah Muhammadiyah. Selain itu perbedaan yang mungkin lebih esensial terletak pada aspek kesejarahan dan ideologi yang menjadi spirit penyelenggaraan Al-Islam Kemuhammadiyah. Pelajaran Kemuhammadiyah tidak terlepas dari Al-Islam. Hal itu dimaksudkan agar siswa mampu menangkap wawasan dan bagaimana bentuk serta nilai-nilai Islam, sosial, ekonomi, politik, kebudayaan dan seluruh aspek ajaran Islam menurut faham Muhammadiyah. Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan di SMP Muhammadiyah sama dengan pengembangan kurikulum SMP Negeri yang mengacu pada Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan, hanya saja untuk SMP Muhammadiyah tidak hanya di bawah pengawasan Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) melainkan juga di bawah pengawasan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Majelis pendidikan dasar dan menengah Muhammadiyah sebagai salah satu unsur pembantu yang bertanggung jawab penuh terhadap persoalan pendidikan Muhammadiyah memiliki peran penting, selanjutnya Dalam Surat Keputusan (PP Muhammadiyah : 2008) Bab III Majelis tingkat pusat sampai dengan tingkat cabang berfungsi sebagai penyelenggara amal usaha program, dan kegiatan bidang pendidikan dasar dan menengah sesuai kebijakan Persyarikatan.

Selain hal tersebut di atas sekolah Muhammadiyah juga merupakan wahana untuk menanamkan dan menyebarkan nilai-nilai serta cita-cita organisasi, menyiapkan kader atau generasi penerus persyarikatan, dan sebagai laboratorium pengembangan pendidikan yang maju yang dapat merespon perubahan dan tantangan masa depan.

Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah sebagai salah satu unsur pembantu pimpinan yang bertanggung jawab penuh terhadap persoalan pendidikan Muhammadiyah memiliki peran yang cukup penting dalam konteks ini. Kemajuan dan kemunduran sekolah Muhammadiyah sesungguhnya tidak dapat dilepaskan dari peran dan fungsi Majelis Dikdasmen Muhammadiyah, seperti penyediaan sarana pra sarana pendidikan, sumber daya manusia; pengawalan terhadap kurikulum yang berlangsung masalah kesejahteraan guru dan karyawan yang ada di semua tingkat satuan pendidikan dan sebagainya.

Arifin (G  
tak terpisahkan  
sistem di sek  
bagaimana ku  
Untuk  
majelis pendic  
Muhammadiyah  
mengetahui pe

### 3. KAJIAN T Pengawasan d

Pelayan  
komputerisasi  
Pelayanan ters  
melainkan ya  
mengeperasion  
terciptanya tert  
adanya implem  
Arifin (2013 : 1  
tujuan pendidik  
semua jenis dan

Dalam :  
Dasar dan Men  
pedoman ini y  
pimpinan Per  
Muhammadiyah  
Muhammadiyah  
unsur pembantu  
usaha, program  
menengah; (5)  
yang di kelolah  
diadakan oleh  
administrative d  
Majelis yang me  
Pengawasan da

Pelaksana  
kemajuan pada t  
sekolah harus da  
negera perencan  
rencana (sebag  
menganalisis asp  
oleh masyarakat

Arifin (2013 : 12) menyebutkan bahwa sistem kurikulum merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem pendidikan, sistem persekolahan dan sistem masyarakat, suatu sistem di sekolah merupakan sistem tentang kurikulum apa yang akan disusun dan bagaimana kurikulum itu di laksanakan.

Untuk itu peneliti mempunyai keinginan mengkaji lebih jauh tentang pengawasan majelis pendidikan dasar dan menengah khususnya pada sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah Luwuk, namun peneliti hanya mengambil pada beberapa aspek saja untuk mengetahui pengawasan majelis pendidikan dasar dan menengah.

## B. KAJIAN TEORETIK

### Pengawasan dalam Pengelolaan Kurikulum.

Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dengan adanya jaringan komputerisasi menjadi lebih cepat dan tentunya dapat menghemat pengeluaran biaya. Pelayanan tersebut terjadi sudah tidak membutuhkan banyak tenaga manusia lagi melainkan yang dibutuhkan adalah manusia yang mempunyai ahli untuk mengoperasikan jaringan komputerisasi tersebut. Oleh karena itu, dalam menunjang terciptanya tertib administrasi dan peningkatan pelayanan publik, perlu didukung dengan adanya implementasi yang berorientasi pada pelayanan dan tujuan yang akan di tercapai. Arifin (2013 : 1) menyatakan bahwa kurikulum merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan pendidikan, sekaligus merupakan pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran pada semua jenis dan jenjang pendidikan.

Dalam Surat Keputusan (PP Muhammadiyah : 2008) tentang Pedoman Majelis Dasar dan Menengah pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ketentuan Umum, dalam pedoman ini yang di maksud dengan : (1) persyarikatan adalah Muhammadiyah; (2) pimpinan Persyarikatan sesuai dengan tingkatannya adalah Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, dan Pimpinan cabang Muhammadiyah; (3) majelis adalah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah merupakan unsur pembantu pimpinan Persyarikatan bidang pendidikan dasar dan menengah; (4) amal usaha, program, dan kegiatan adalah bentuk usaha bidang pendidikan dasar dan menengah; (5) keuangan dan kekayaan adalah seluruh harta benda milik Persyarikatan yang di kelolah oleh Majelis; (6) pengawasan adalah pemeriksaan dan pengendalian yang dilakukan oleh Pimpinan Persyarikatan terhadap Majelis; (7) sanksi adalah tindakan administrative dan atau yuridis yang di lakukan oleh Pimpinan Persyarikatan terhadap Majelis yang menyalahi ketentuan dan peraturan yang berlaku.

### Pengawasan dalam Pelaksanaan Ketenagaan

Pelaksanaan ketenagaan mempunyai tugas mengkoordinir dalam pelaksanaan kebijakan pada tingkat tenaga pendidik, Syaiful Sagala (2011:116) semua anggota tim sekolah harus dapat melakukan kerja sama dalam rangka mensukseskan program sekolah, tenaga perencana sekolah adalah bagian dari tenaga kependidikan di sekolah, tenaga perencana (sebagai tenaga kependidikan) sekolah berfungsi dan bertugas menampung dan menganalisis aspirasi, ide, dan tuntutan berbagai kebutuhan pendidikan yang di ajukan oleh masyarakat dengan menggunakan teknik-teknik *survey needs assessment*.

Kepagawaian disebut juga personalia atau karyawan dan pegawai tersebut juga personel atau karyawan. Karena menurut penulis artinya sama. Ketenagaan sekolah ialah semua manusia yang tergabung di dalam kerja sama pada suatu sekolah untuk melaksanakan tugas-tugas dalam mencapai tujuan pendidikan, mereka ini terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, kepala tata usaha, semua karyawan tata usaha termasuk penjaga sekolah. Untuk bekerja secara baik, artinya antara petugas satu dengan petugas yang lainnya tidak overlap (maka perlu diadakan penataan pada bidang kepegawaian).

#### **Pengawasan dalam Pengelolaan Sarana dan Prasarana.**

Sarana dan prasarana diibaratkan sebagai motor penggerak, begitu pula dengan pendidikan, sarana dan prasarana sangat penting karena sebagai penunjang penyelenggaraan proses belajar mengajar, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam suatu lembaga dalam rangka mencapai tujuan pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan juga merupakan sumber daya yang menjadi tolak ukur mutu sekolah dan perlu peningkatan terus menerus seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cukup canggih. Manajemen Sarana dan prasarana sangat diperlukan dalam menunjang tujuan pendidikan yang sekaligus menunjang pembangunan nasional, oleh karena itu diperlukan pengetahuan dan pemahaman konseptuan yang jelas agar dalam implementasinya tidak salah arah sehingga perlu diadakan pengawasan yang jelas.

Peran Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah sebagai salah satu unsure pembantu pimpinan yang bertanggung jawab penuh terhadap persoalan pendidikan Muhammadiyah memiliki peran yang cukup penting dalam konteks pengembangan pendidikan, kemajuan dan kemunduran sekolah Muhammadiyah sesungguhnya tidak dapat dilepaskan dari peran dan fungsi Majelis Dikdasmen Muhammadiyah, seperti penyediaan sarana dan prasarana pendidikan.

Sering di katakana bahwa tugas majelis Dikdasmen hamper sama dengan Dinas pendidikan, sama-sama memiliki fungsi dan peran sebagai penanggung jawab penuh terhadap sumber daya manusia/tenaga pendidik dan kependidikan di semua tingkat satuan pendidikan, peran majelis Pendidikan Dasar dan Menengah selanjutnya adalah bagaimana agar seluruh kegiatan di sekolah, baik mengenai sarana dan sarana sekolah, pembelajaran maupun pengelolaan dapat berjalan dengan efektif dan kreatif.

Berdasarkan uraian teori diatas bahwa implementasi pengawasan dalam pengelolaan sarana dan prasarana adalah pengawasan yang dilakukan untuk diketahui baik dari sumber sarana dan prasaran yang didapatkan, pemanfaatannya, penyimpanan sampai dengan perawatan yang dilakukan sehingga sarana prasarana dapat terjaga dengan baik.

#### **Pengawasan dalam Pengelolaan Keuangan Sekolah**

Pengawasan harus disadari oleh semua pihak, baik yang mengawasi dan oleh yang diawasi maupun oleh masyarakat umum. Lebih tegasnya lagi pengawasan merupakan salah satu unsure penting dalam rangka peningkatan perdayagunaan aparatur Negera dalam pelaksanaan tugas-tugas umum Pemerintahan yang bersih dan wibawa.

Selanjutnya menurut Sutedi (2012:171), pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya penyelewengan atau penyimpangan kegiatan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi atas suatu kegiatan.

Berdasarkan dengan adanya uraian teori diatas, dapat disimpulkan bahwa implementasi pengawasan dalam pengelolaan keuangan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh lembaga terkait untuk mengetahui sumber pendapat dan pembiayaan yang digunakan serta memantau dan menilai hasilnya. Dari pengelolaan keuangan yang dilakukan. Sumber pendapatan sekolah dari Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di sekolah/madrasah Muhammadiyah sesuai dengan kemampuan berdasarkan peraturan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 098/KEP/L4/F/2009.

### **C. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif jenis deskriptif eksplanatory yang berhubungan dengan pengawasan majelis pendidikan Dasar dan Menengah pada Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah Luwuk, alasan mendasar menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif eksplanatory dalam penelitian ini karena dimensi-dimensi Pengawasan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah yang dikembangkan melalui indikator-indikator yang diukur yang ditinjau dari 4 (aspek) pengawasan antara lain : (1). Pengelolaan kurikulum, (2). Pelaksanaan Ketenagaan, (3). Pelaksanaan Pengelolaan Sarana dan Prasarana, (4). Pengawasan dalam Pelaksanaan Pengelolaan keuangan.

### **D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Pengawasan dalam Pelaksanaan Pengelolaan Kurikulum**

Kurikulum merupakan hal yang sangat menentukan keberhasilan kegiatan belajar mengajar secara maksimal. Kurikulum berfungsi sebagai pedoman atau acuan, bagi guru, pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran, bagi kepala sekolah dan pengawas serta sebagai pedoman dalam melaksanakan pengawasan.

**Tabel 1. Hasil Perhitungan Persentase Skor Jawaban Responden dalam Tahapan Pengawasan Pelaksanaan Kurikulum**

Indikator	No Item	Bobot Skor										Jumlah		% Skor
		5		4		3		2		1		F	X	
		F	X	F	X	F	X	F	X	F	X			
Pengawasan Pelaksanaan Kurikulum	1	3	15	8	32	10	30	4	8	0	0	25	85	68
	2	5	25	8	32	7	21	5	10	0	0	25	88	70,4
	3	5	25	4	16	16	48	0	0	0	0	25	89	71,2
	4	5	25	7	28	7	21	5	10	0	0	25	84	67,2
	5	0	0	0	0	4	14	17	34	4	4	25	50	40
<b>Rata-Rata= 316,8 / 5 = 63,36%</b>														

Keterangan:

F=Frekuensi responden yang menjawab sesuai dengan kategori jawaban

X=Frekuensi dikalikan dengan bobot nilai kategori jawaban

Berdasarkan tabel diatas yang disajikan dapat disimpulkan nilai rata-rata persentase skor peroleh pada tahapan pengawasan pelaksanaan kurikulum di Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah Luwuk, diperoleh skor rata-rata 63.36%, jika dikonstruksikan pada hasil penilaian dapat disimpulkan kriteria yang diperoleh adalah cukup.

## 2. Pengawasan Pelaksanaan Ketenagaan.

Analisis Tahapan Pengawasan Pelaksanaan Ketenagaan di SMP Muhammadiyah Luwuk. Hasil analisis data terhadap skor tahapan pengawasan pelaksanaan ketenagaan pada Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah Luwuk yang dijabarkan dalam 5 item pernyataan sehingga dari pernyataan nomor 1 sampai nomor 5 dilakukan dengan perhitungan teknik *Weighted Means Scored* (WMS) sebagaimana pada tabel 2.

**Tabel 2. Hasil Perhitungan Persentase Skor Jawaban Responden dalam Tahapan Pengawasan Pelaksanaan Ketenagaan**

Indikator	No Item	Bobot Skor										Jumlah		% Skor
		5		4		3		2		1		F	X	
		F	X	F	X	F	X	F	X	F	X			
Pengawasan Pelaksanaan Ketenagaan	1	10	50	4	16	4	12	7	14	0	0	25	92	69,6
	2	7	35	7	28	6	18	6	12	0	0	25	93	74,4
	3	7	35	8	32	8	24	2	4	0	0	25	95	76
	4	8	40	6	24	5	15	6	12	0	0	25	91	72,8
	5	6	30	5	20	7	21	7	14	0	0	25	85	68
<b>Rata-Rata= 360,8/ 5 = 72,16%</b>														

Keterangan:

F=Frekuensi responden yang menjawab sesuai dengan kategori jawaban

X=Frekuensi dikalikan dengan bobot nilai kategori jawaban

pada t  
diperole  
disimp

tahapa  
yang  
pelaks  
3. Pen

di SM  
pernya  
Means

Tabel

Indikat

Pengawa  
Pelaksana  
pengelol  
Sarana &  
Prasarana

Keteran

F=Frek

X=Frek

perole  
SMP M  
pada k  
Tinggi

tahapa  
Muhan  
katego  
di SM

4. Pen

dijabar  
5 dilal  
sebag

am Tahapan

% Skor
68
70,4
71,2
67,2
40

lai rata-rata  
di Sekolah  
3,36%, jika  
oleh adalah

di SMP  
pengawasan  
yah Luwuk  
er 1 sampai  
ed (WMS)

hapan

Berdasarkan tabel 2 dapat disimpulkan nilai rata-rata persentase skor diperoleh pada tahapan pengawasan pelaksanaan ketenagaan di SMP Muhammadiyah Luwuk diperoleh skor rata-rata 72,16%, jika dikonsutasikan pada kriteria penilaian maka disimpulkan kriteria yang diperoleh adalah tinggi.

Uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa persentase skor yang tertinggi pada tahapan pengawasan pelaksanaan ketenagaan di SMP Muhammadiyah uwuk skor yang diperoleh adalah 76% Hal ini di kategorikan pada tahapan pengawasan pelaksanaan ketenagaan di SMP Muhammadiyah Luwuk sangat berperan.

### 3. Pengawasan dalam Pelaksanaan Pengelolaan Sarana dan Prasarana.

Analisis Tahapan Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan Sarana dan Prasarana di SMP Muhammadiyah Luwuk dijabarkan dalam 5 item pernyataan sehingga dari pernyataan nomor 1 sampai nomor 5 dilakukan dengan perhitungan teknik *Weighted Means Scored* (WMS) adalah sebagaimana pada tabel 3 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. Hasil Perhitungan Persentase Skor Jawaban Responden dalam Tahapan pengawasan pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana**

Indikator	No Item	Bobot Skor										Jumlah		% Skor
		5		4		3		2		1		F	X	
		F	X	F	X	F	X	F	X	F	X			
Pengawasan	1	1	5	3	12	7	21	10	20	5	5	25	63	50,4
Pelaksanaan	2	6	30	7	28	6	18	6	12	0	0	25	88	70,4
pengelolaan	3	6	30	7	28	7	21	5	10	0	0	25	89	71,2
Sarana &	4	6	30	6	24	5	15	6	12	0	0	25	81	64,8
Prasarana	5	8	40	3	12	4	12	10	20	0	0	25	84	67,2
<b>Rata-Rata= <math>324,1 / 5 = 64,82\%</math></b>														

Keterangan:

F=Frekuensi responden yang menjawab sesuai dengan kategori jawaban

X=Frekuensi dikalikan dengan bobot nilai kategori jawaban

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan nilai rata-rata persentase skor diperoleh pada tahapan pengawasan pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana di SMP Muhammadiyah Luwuk, maka diperoleh skor rata-rata 88,8, jika dikonsutasikan pada kriteria penilaian maka disimpulkan kriteria yang diperoleh adalah Sangat Tinggi

Uraian diatas dapat disimpulkan bahwa persentase skor yang tertinggi pada tahapan pengawasan pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana di SMP Muhammadiyah Luwuk skor yang diperoleh adalah 64,8% Hal ini dapat di kategorikan pada tahapan pengawasan pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana di SMP Muhammadiyah Luwuk kurang berperan.

### 4. Pengawasan dalam Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan

Analisis Tahapan Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan yang dijabarkan dalam 5 item pernyataan sehingga dari pernyataan nomor 1 sampai nomor 5 dilakukan dengan perhitungan teknik *Weighted Means Scored* (WMS) adalah sebagaimana pada tabel 4. adalah sebagai berikut:

**Tabel 4. Hasil Perhitungan Persentase Skor Jawaban Responden dalam Tahapan Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan**

Indikator	No Item	Bobot Skor										Jumlah		% skor
		5		4		3		2		1		F	X	
		F	X	F	X	F	X	F	X	F	X			
Pengawasan dalam Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan	1	8	40	3	12	4	12	10	20	0	0	25	84	67,2
	2	11	55	3	12	2	6	9	18	0	0	25	91	72,8
	3	11	55	3	12	2	6	9	18	0	0	25	91	72,8
	4	5	25	7	28	6	18	7	4	0	0	25	85	68
	5	6	30	7	28	8	24	4	8	0	0	25	90	72
<b>Rata-Rata = 352,8 / 5 = 70,56%</b>														

Keterangan:

F=Frekuensi responden yang menjawab sesuai dengan kategori jawaban

X=Frekuensi dikalikan dengan bobot nilai kategori jawaban

Berdasarkan tabel 4. yang disajikan di atas dapat disimpulkan nilai rata-rata persentase skor peroleh pada tahapan pengawasan pelaksanaan pengelolaan keuangan di SMP Muhammadiyah Luwuk, maka diperoleh skor rata-rata 70,56%, jika dikonsultasikan pada kriteria penilaian maka disimpulkan kriteria yang diperoleh adalah Tinggi.

Uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa persentase skor yang tertinggi pada tahapan pengawasan pelaksanaan pengelolaan keuangan di SMP Muhammadiyah Luwuk skor yang diperoleh adalah 70,56% Hal ini dapat dikategorikan pada tahapan pengawasan pelaksanaan pengelolaan keuangan di SMP Muhammadiyah Luwuk ikut berperan.

### E. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah Luwuk yang penelitiannya berfokus pada Pengawasan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan menunjukkan bahwa Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah memiliki peran dalam pengawasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengawasan dalam Pelaksanaan Pengelolaan kurikulum di Sekolah Muhammadiyah Luwuk belum mencapai hasil yang maksimal sehingga di harapkan peran serta Majelis Dikdasmen untuk menentukan rancangan kurikulum yang maksimal, karena pada dasarnya kurikulum merupakan pusat kegiatan pendidikan.
2. Peran Majelis Dikdasmen di harapkan lebih baik lagi ke depannya khususnya di Sekolah Menengah Pertama berkaitan dengan Pengawasan Pelaksanaan Ketenagaan yang melakukan perekrutan, penempatan, pembinaan dan pemberhentian tenaga kependidikan sesuai qaidah Majelis Dikdasmen, serta untuk pengembangan sekolah yang lebih maju demi terlaksananya cita-cita Muhammadiyah.
3. Pengawasan dalam Pelaksanaan Pengelolaan sarana dan Prasarana juga merupakan peran dan tanggung jawab Majelis Dikdasmen, sarana dan prasarana yang ada di Sekolah Muhammadiyah Luwuk cukup memadai hanya saja pengelolaannya tidak

dilakukan de  
4. Pengawasan o  
Dikdasmen sa  
mengenai per  
untuk melak  
lagi demi ken

### DAFTAR PUST

Adrian Sutedi, 20  
Direktorat SLP D  
Arifin, Z. 2013. F  
AS. Hornby. 1  
Universi  
Blanchard, Ken.,  
Koehler  
Baldric Siregar d  
BPFE, Y  
Caldwell, B. J. (2  
Costa, Vincent.  
Depdikr  
Depag RI.2001  
Balitban  
DepartemenPend  
Departemen Pen  
Sekolah  
DepartemenPend  
pendidika  
Djamaluddin, M  
Anggara  
E. Mulyasa, Ma  
M. F.,K  
Tahun X  
Flippo, Edwin B  
Book C  
Fred C. Lunent  
Practice  
H.A.R. Tilaar, M  
Syaiful Sagala,  
Penerbit  
Sarat Keputusan  
Pedoma  
Peraturan Ma  
Muham  
Pember

dilakukan dengan baik.

4. Pengawasan dalam Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan yang di lakukan Oleh Majelis Dikdasmen sangat berperan penting karena harus berkoordinasi dengan pihak sekolah mengenai pengelolaan dan anggaran keuangan termasuk laporan pertanggung jawaban untuk melakukan RABS, kedepannya Peran majelis Dikdasmen harus di tingkatkan lagi demi kemajuan Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah Luwuk.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, 2012, *Hukum Keuangan Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, Direktorat SLP Dirjen Dikdasmen Depdiknas.
- Anifin, Z. 2013. *Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum*, Bandung, PT Rosda karya AS. Hornby. 1990. *Oxford Edvanded Dictionary of English*. London: Oxford University Press.
- Blanchard, Ken., & O'Connor, Michael. *Managing By Values*. (First published Berret-Koehler Publisher. Inc San Fransisco, CA, 1998)
- Baldric Siregar dan Bonni Siregar (2000) *Akuntansi Pemerintahan dengan Sistem Dana*, BPFE, Yogyakarta.
- Caldwell, B. J. (2002). *Autonomy and self-management*
- Costa, Vincent. P. 2000. *Panduan Pelatihan untuk Pengembangan Sekolah*. Jakarta: Depdiknas.
- Depag RI.2001.*Perencanaan Pendidikan Menuju Madrasah Mandiri*, Jakarta: Balitbang
- DepartemenPendidikanNasional. 2002. *ManajemenKeuangan*.
- Departemen Pendidikan Nasional.2001. *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*, Jakarta: Direktorat Pendidikan Menengah Umum
- DepartemenPendidikanNasional.undang-undang no 20 tahun 2003 tentang system pendidikannasional, Jakata :Depdikna.
- Djamaluddin, M. Arif. 1977. *Sistem Perencanaan Pembuatan Program dan Anggaran, Suatu Pengantar*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- E. Mulyasa, *ManajemenBerbasisSekolah*, (Bandung: RemajaRoosdakarya, 2002)Gaffar, M. F.,*KonsepdanFilosofiBiayaPendidikan*. (Bandung: MimbarPendidikan No.1 Tahun X April 1991)
- Hippo, Edwin B. 1984. *Personnel Management*, sixth edition. New York: Mc. Graw-Hill Book Company.
- Fred C. Lunenburg & Allan C. Ornstein, *Education Administration: Concepts and Practices* (California: Wadsworth, Inc).
- H.A.R. Tilaar, *Membenahi Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002, Cet.I)
- Syaiful Sagala, *Manajemen Strategikdalam Peningkatan Mutu Pendidikan*. (Bandung: PenerbitAlfabeta, 2007)
- Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 138/KEP/I.0/B/2008 tentang Pedoman Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Peraturan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 097/KEP/I.4/F/2009 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pengawas Sekolah/Madrasah Muhammadiyah



9 771412 985001